

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Kawasan Ekonomi Garam**

##### **A. Konsep Kawasan Ekonomi Garam**

Isu swasembada garam menjadi salah satu isu yang ramai diperbincangkan, hal tersebut disebabkan karena Indonesia masih bergantung pada garam impor. Kondisi penggaraman Indonesia bertolak belakang dengan apa yang terjadi pada masa sebelum Indonesia merdeka, dimana saat itu Indonesia menjadi eksportir garam untuk kebutuhan garam luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa garam merupakan komoditas yang strategis dan seharusnya menjadi perhatian sejak dulu. Namun sejak Indonesia merdeka, hal ini berbalik menjadi garam tidak lagi merupakan komoditas strategis. Kebutuhan akan garam seharusnya sudah mulai dapat dipenuhi dari dalam negeri, mengingat selama ini walaupun Indonesia mengimpor garam namun juga mengekspor garam (Rochwulaningsih Y. , 2013). Direktur Utama PT. Garam (Persero) menyampaikan setidaknya ada 3 penyebab mengapa Indonesia masih mengimpor garam (Sutianto, 2015). Pertama, masa panen dan pengolahan garam di Indonesia relatif sangat singkat dan sederhana. Sehingga berakibat pada kualitas garam Indonesia yang masih rendah. Petani garam yang mayoritas masih melakukan cara tradisional dalam beberapa tahapan penggaraman, utamanya tahapan *refinery* guna menaikkan kualitas garam. Kendala Kedua adalah teknologi. Indonesia belum memiliki teknologi pengolahan untuk garam berkualitas rendah. Padahal hal tersebut dibutuhkan untuk menaikkan kualitas garam agar sesuai dengan kebutuhan industri pangan. Ketiga, kesulitan mencari lahan baru. Selama ini lahan yang ada secara total cukup luas bahkan belum dimaksimalkan tetapi berada pada lokasi yang terpisah-pisah atau tidak berada dalam satu lokasi yang terintegrasi.

Dalam upaya mengembangkan usaha garam rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan garam dalam negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan mencanangkan Pembangunan Kawasan Ekonomi Garam yang akan mulai dilaksanakan pada tahun

2020 dan seluruh targetnya akan dicapai pada tahun 2024. Kawasan Ekonomi Garam merupakan bagian dari industrialisasi kelautan dan perikanan melalui peningkatan nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan salah satunya adalah garam (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.27 Tahun 2012). Dalam Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2012 tertuliskan hal-hal yang berkaitan dengan konsep dari Kawasan Ekonomi Garam diantaranya ; (1) Strategi penataan dan pengembangan kawasan dan sentra produksi secara berkelanjutan salah satunya melalui penyiapan kawasan garam, (2) Strategi pengembangan konektivitas dan infrastruktur serta perluasan hubungan bisnis hulu-hilir, (3) Strategi pengembangan usaha dan investasi melalui penguatan pemasaran garam, (4) Pengembangan teknologi produktif budidaya dan penangkapan ikan serta pengolahan hasil perikanan dan garam. Berlandaskan dengan kebijakan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan membuat konsep Kawasan Ekonomi Garam sebagai berikut (Hasil notulensi Rapat KE Garam bersama Subdit Jasa Kelautan dan Biofarmakologi; Senin, 17 Juni 2019) :

1. Membangun kawasan garam mulai dari hulu-hilir (pemberdayaan-pengolahan-pemasaran)
2. Mengoptimalkan infrastruktur pergaraman (pembangunan Gudang Garam Nasional)
3. Mengoptimalkan besaran produksi garam untuk memenuhi kebutuhan pangan dan non pangan (melalui inovasi integrasi lahan)
4. Menjadikan proses tata niaga komoditas garam menjadi lebih efisien (pelibatan stakeholder)
5. Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

Tantangan utama pembangunan sektor kelautan dan perikanan terdapat di sektor hulu, dimana tahap tersebut merupakan tahap peningkatan kemampuan sumber daya manusia sebagai pelaku utama pengelola hasil laut yang salah satunya adalah garam. Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam beberapa tahun terakhir ini juga mulai melakukan optimalisasi pengembangan sektor hulu produk berbasis kelautan, terutama pengembangan tambak garam rakyat dan pemberdayaan sumber daya

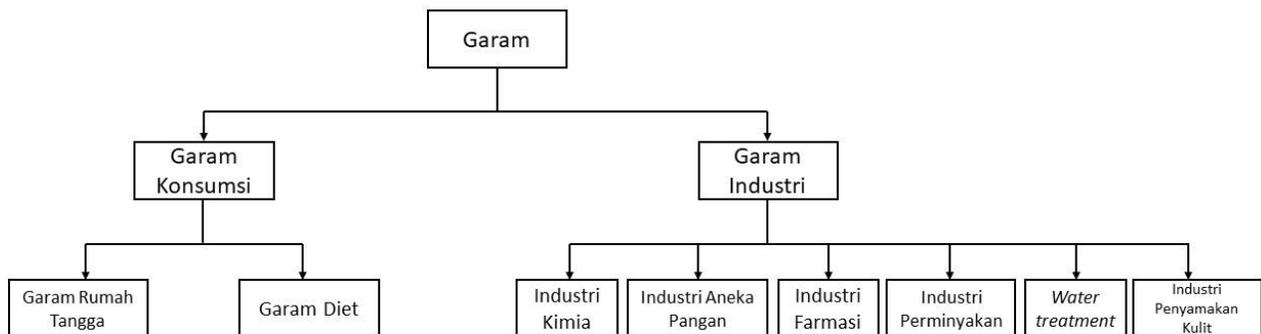
manusianya. Salah satu bentuk pemberdayaan sumber daya manusia yaitu petani garam dilakukan melalui program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat yang merupakan rangkaian persiapan pembangunan Kawasan Ekonomi Garam. Untuk sektor hilir terkait dengan sektor kelautan dan perikanan menyangkut aspek pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan produk kelautan salah satunya adalah garam. Pada tahap ini perlu dilakukan perubahan sistem produksi garam efisien dengan sentuhan teknologi dan manajemen yang mampu meningkatkan produksi garam berkualitas dan dalam rangka swasembada garam nasional. Hingga pada pemasaran, komoditas garam masih menghadapi permasalahan karena persaingan pasar dan kualitas kebutuhan konsumen garam sangat tinggi. Kondisi tersebut tentu berpengaruh pada upaya peningkatan pendapatan petani garam terhadap pembangunan ekonomi secara keseluruhan (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2012)

## **B. Produksi Garam Indonesia**

Garam merupakan komoditas yang sangat dibutuhkan bagi berbagai sektor baik sektor rumah tangga maupun industri. Pada sektor rumah tangga, pemanfaatan garam sebagai kebutuhan sehari-hari sedangkan pada sektor industri pemanfaatan garam sebagai bahan baku dalam pembuatan berbagai produk industri diantaranya, produksi pipa PVC, sabun, kosmetik, tekstil manufaktur, industri pangan dan lain sebagainya. Kualitas garam yang dibutuhkan dalam kebutuhan industri pada umumnya lebih baik dibandingkan dengan kualitas garam yang dibutuhkan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, garam dengan kualitas tinggi harus dipenuhi oleh produsen dalam negeri. Permintaan garam sektor industri pada total kebutuhan garam nasional sebesar 40% sehingga diperlukan perhatian khusus karena sampai pada saat ini pemenuhan kebutuhan garam nasional belum dilakukan secara swasembada. Mengatasi hal tersebut, kegiatan impor kerap kali dilakukan untuk memenuhi kebutuhan garam di sektor industri dengan kualifikasi yang lebih baik dibandingkan dengan garam yang diproduksi oleh produsen lokal. Sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia sebenarnya sudah memadai untuk melakukan swasembada garam, hal tersebut diperkuat dengan

keadaan geografis negara Indonesia yang merupakan negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia sehingga dimungkinkan untuk mampu memenuhi kebutuhan garam nasionalnya dan bukan tidak mungkin akan menjadi negara yang mengekspor garam untuk kebutuhan akan garam internasional (Sulistiyono, 2015)

Garam nasional diklasifikasikan secara garis besar menjadi dua jenis garam yaitu garam konsumsi dan garam industri. Pengklasifikasian tersebut didasarkan pada Peraturan Menteri Perindustrian No. 88/M-IND/PER/10/2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian No. 134/M-IND/PER/10/2009 tentang peta panduan (roadmap) pengembangan klaster industri garam. Berdasarkan Permenperin No. 88/M-IND/PER/10/2014 yang dimaksud dengan garam konsumsi adalah garam yang digunakan untuk konsumsi masyarakat atau dapat diolah menjadi garam rumah tangga dan garam diet. Sedangkan garam industri pada peraturan Menteri Perindustrian No. 88 Tahun 2014 tersebut adalah garam yang digunakan sebagai bahan baku/bahan penolong yang digunakan pada proses produksi pada industri kimia, industri aneka pangan, industri farmasi, industri perminyakan, industri penyamakan kulit dan water treatment.



Sumber : Permenperin No. 88/M-IND/PER/10/2014

**Gambar 2. 1 Pengelompokan Garam Berdasarkan Permenperin**

Adanya pengklasifikasian peruntukan garam dimaksudkan agar impor garam dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan garam industri. Namun Perbedaan

klasifikasi garam dunia dan garam nasional menimbulkan permasalahan dalam perdagangan luar negeri khususnya pada saat impor. Klasifikasi garam dunia tidak membedakan peruntukan garam konsumsi maupun garam industri sehingga garam impor yang masuk ke dalam negeri masih sulit dibedakan apakah garam tersebut merupakan garam konsumsi atau garam industri yang meningkatkan resiko merembesnya garam impor sebagai garam konsumsi. Produksi garam nasional pada saat ini hanya mampu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri dari segi konsumsi saja, sementara untuk industri dipenuhi dari impor (Effendy, Heryanto, Sidik, & Muhsoni, 2016). Produksi garam nasional pada tahun 2010 sempat mengalami penurunan tajam hingga hanya mencapai 30,6 ribu ton. Turun sangat signifikan dari produksi tahun sebelumnya yang mencapai 1,4 juta ton. Merosostnya produksi garam pada tahun 2010 disebabkan adanya perubahan iklim dimana musim hujan yang terjadi hampir sepanjang tahun sehingga merusak siklus produksi garam (Aprilia, 2011)

Sebagian besar produksi garam dilakukan secara individual oleh petani garam rakyat sehingga kuantitas produksi garam memiliki besaran yang rendah dan tidak memenuhi kebutuhan dari sisi konsumsi dan industri. Apabila dibandingkan antara kebutuhan nasional hanya mampu memenuhi kebutuhan dari sisi konsumsi, sementara untuk kebutuhan bahan baku industri masih bergantung pada impor. Walaupun garam konsumsi telah dipenuhi oleh produksi dalam negeri, namun ternyata sebagian besar produksi garam rakyat masih membutuhkan proses pengolahan lebih lanjut untuk dapat memenuhi segala standar yang dibutuhkan hingga layak dikonsumsi oleh masyarakat (Effendy, Zainuri, & Hafiluddin, Intensifikasi Lahan Tambak Garam Rakyat di Kabupaten Sumenep, 2014). Rendahnya kualitas produksi garam serta persaingan dengan garam impor membuat harga garam dalam negeri semakin tidak stabil. Padahal, usaha produksi garam rakyat juga merupakan salah satu roda penggerak perekonomian, sebab menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat di kawasan pesisir Indonesia dan menjadi sarana untuk mengentaskan kemiskinan (Kusumastanto & Satria, 2011). Penyebab permasalahan kualitas garam rakyat juga ada pada tingkat petani garam, dimana petani garam rakyat masih minim akses terhadap teknologi, permodalan, serta

transportasi. Sistem produksi yang dilakukan petani maupun industri pada umumnya menggunakan teknologi kristalisasi konvensional, yang dilakukan tanpa kontrol secara rutin.

Kebutuhan garam pada sektor industri menuntut kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan garam untuk konsumsi rumah tangga. Supaya dapat memanfaatkan peluang tersebut, maka penting bagi pemerintah untuk mengupayakan berbagai terobosan baru yang mampu memberikan insentif kepada produsen garam dalam negeri untuk dapat memproduksi garam dengan kualitas tinggi. Apalagi kebutuhan garam dari sektor industri berkontribusi lebih dari 80% dari total kebutuhan garam nasional (Sulistiyono, 2015). Selain permasalahan terkait dengan kualitas garam yang dihasilkan, permasalahan lain dalam penggaraman adalah produktivitas garam yang masih rendah. Sebagai contoh jika produktivitas garam rakyat hanya sebesar 60 ton/hektar, maka dapat disimpulkan produktivitas garam domestik hanya berkisar 60 ton/hektar hingga 70 ton/hektar (juga beserta garam produksi PT. Garam). Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan Australia yang dapat menghasilkan garam dengan produktivitas yang mencapai 350 ton/hektar (Idris, 2015).

## **2.2 Tingkat Keberdayaan Petani Garam**

Dalam mengelola sumber daya alam diperlukan aktor yang terlibat dalam pengelolaannya untuk menghasilkan produk, terutama produsen. Demikian pula dalam pengelolaan sumber daya garam dengan petambak garam sebagai produsen utamanya. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2016, petambak garam adalah warga Indonesia yang melakukan kegiatan produksi garam yang meliputi pemilik tambak garam, penggarap tambak garam, dan petambak garam kecil. Sebagai pelaku utama produksi garam yang berkontribusi besar terhadap produksi garam nasional, petambak garam masih memiliki kondisi kehidupan yang secara umum masih jauh dari ukuran sejahtera. Permasalahan yang menyebabkan kemiskinan masih menjadi kendala bagi masyarakat pesisir yang juga menggambarkan keadaan petani

garam. Pada umumnya, mereka menggantungkan hidupnya dari pemanfaatan sumber daya laut dan pantai yang membutuhkan investasi besar dan bergantung pada musim (Widodo, 2011). Mekanisme harga dan pasar garam bergantung pada kondisi iklim dan cuaca yang cenderung tidak berpihak kepada petani garam sehingga menjadikan petani garam tidak berdaya dalam mengendalikan perekonomian individu. Menanggulangi ketidakberdayaan petani garam yang menyebabkan kemiskinan diperlukan sebuah upaya pemberdayaan masyarakat sebagai konsep pembangunan untuk mempersiapkan aktor yang akan terlibat dalam proses berlangsungnya pembangunan. Sebab, pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan yang merangkum multi-aspek. Konsep ini mewakili paradigma baru pembangunan yang bersifat *people centred, participatory, empowering, dan sustainable* (Chambers, 1995) dalam (Firmansyah, 2012).

Penggunaan istilah pemberdayaan erat kaitannya dengan paradigma pembangunan masyarakat (*community development*) yang muncul dari kritik terhadap paradigma pembangunan berbasis pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Ife (1995) dalam (Mulyawan, 2016), yakni sebagai berikut :

*“Empowerment means providing people with the resource, opportunities, knowledge and skills to increase their capacity to determine their own future, and to participate in and affect the life of their community. Empowerment should be aim of all community development.”*

Pernyataan tersebut mengemukakan bahwa pemberdayaan memiliki arti mendekatkan masyarakat pada sumber-sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menentukan masa depan mereka dan untuk ikut berperan serta didalamnya sehingga dapat memberikan pengaruh pada kehidupan komunitasnya. Oleh sebab itu, pemberdayaan merupakan alat dari seluruh pembangunan masyarakat.

Dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat harus dilihat dari tiga sisi. Pertama, upaya itu harus mampu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan

potensi masyarakat untuk berkembang (*enabling*). Kedua, upaya tersebut harus memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Ketiga, sebuah upaya meningkatkan keberdayaan harus mengandung arti melindungi (Sumodiningrat, 1998). Selain ketiga hal tersebut, yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah indikator-indikator terkait keberdayaan. Indikator-indikator keberdayaan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan. Menurut Ife, terdapat prinsip-prinsip pemberdayaan diantaranya prinsip holisme, keberlanjutan, keanekaragaman, perkembangan organik, perkembangan yang seimbang, dan mengatasi struktur yang merugikan (Ife & Tesoriero, 2014). Mengenai indikator keberdayaan, terdapat beberapa kajian konseptual yang membahas indikator yang dapat digunakan dalam mengkaji tingkat keberdayaan suatu masyarakat. Empat indikator menyangkut derajat keberdayaan yakni :

- a. Tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah (*power to*).
- b. Tingkat kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses (*power within*).
- c. Tingkat kemampuan menghadapi hambatan (*power over*).
- d. Tingkat kemampuan partisipasi atau kerjasama dan solidaritas (*power with*).

Apabila suatu program pemberdayaan sebagai alat untuk meningkatkan keberdayaan dari penerima program, maka penerima program juga harus memberikan upaya bagi dirinya atau kelompoknya untuk berkembang. Dari indikator yang dikemukakan oleh (Suharto, 2006), kesadaran dan keinginan untuk berubah harus timbul dari dalam diri penerima program, dalam hal ini petani garam yang menerima program pemberdayaan dengan kemauannya untuk berkembang akan memperoleh kemudahan akses untuk meningkatkan wawasan, kemampuan, atau kapasitas. Meningkatnya kapasitas dari petani garam akan mempermudah mereka dalam menghadapi hambatan yang nantinya akan sering terjadi dalam kegiatan produksi

garam. Selain dari kemampuan individu dari masing masing petani garam, kemampuan bekerjasama dengan individu petani garam yang lain atau antar kelompok petani garam juga merupakan indikator apakah petani garam atau kelompok petani garam yang menerima program telah berdaya.

Indikator keberdayaan lainnya yang berkaitan dengan basis keberdayaan dikemukakan oleh (Friedman, 1992) dalam (Firmansyah , 2012) yakni :

- a. Pengembangan berbasis masyarakat.
- b. Keberlanjutan
- c. Partisipasi masyarakat.

Pengembangan berbasis masyarakat merupakan pendekatan pembangunan alternatif yang bertujuan menyelenggarakan pembangunan yang lebih berkeadilan (Wrihatnolo & Dwidjowijoto, 2007). Model pembangunan alternatif yang pada hakekatnya memandang bahwa terjadinya kemiskinan dan keterbelakangan bukan disebabkan masyarakat bodoh dan tidak memiliki kemampuan, akan tetapi ketidakberdayaan terjadi akibat ketidakmampuan masyarakat terhadap tekanan struktural yang disebabkan oleh model pembangunan pertumbuhan yang mengabaikan hak-hak kemanusiaan. Oleh sebab itu, konsep pemberdayaan atau pengembangan berbasis masyarakat menjadi sebuah bagian penting sebagai alternatif dari pembangunan (Suparjan & Suyatno, 2003). Keberhasilan pelaksanaan program pembangunan khususnya yang berbasis masyarakat ditentukan oleh mekanisme pelaksanaan program dimana mekanisme yang dimaksud sangat menentukan keberhasilan dan keberlanjutan dari program pengembangan masyarakat yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif. Sesuai dengan pemahaman mengenai pengembangan berbasis masyarakat sebagai siklus pembangunan partisipatif, maka masyarakat harus mampu memberikan pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan program. Untuk itu adanya pilihan teknologi dan tingkat layanan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat menjadi prasyarat utama dalam keberlanjutan (Vlacheas, P. et.al., 2013). Pernyataan tersebut juga memperkuat bahwa pembangunan

dengan konsep pemberdayaan atau pengembangan berbasis masyarakat membutuhkan kekuasaan yang adil (*equitable sharing of power*) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap sumber daya alami dan pengelolaannya secara berkelanjutan . Artinya dalam meningkatkan keberdayaan petani garam diperlukan tingkat partisipasi dan kesadaran yang tinggi dari petani garam yang menerima program, selain itu dibutuhkan sebuah program yang adil dan menyeluruh baik dari peningkatan wawasan dan pengadaan infrastrukturnya agar tercapainya tujuan untuk memperkuat kapasitas dari petani garam agar mampu mengubah keadaan serta memiliki kekuatan untuk mendorong terjadinya perubahan besar yang sangat diperlukan dalam masyarakat.

Proses pemberdayaan masyarakat menjadi suatu proses yang bertitik tolak untuk memahirkan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumber daya sebaik mungkin. Sumodiningrat (1997) mengartikan keberdayaan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan (Totok, 2003). Dampak pemberdayaan masyarakat adalah kemandirian masyarakat dalam mengatasi permasalahan melalui prakarsa dan kreatifitas untuk meningkatkan kualitas hidup. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sulistiyani (2004) bahwa, tujuan pemberdayaan adalah terbentuknya individu dan masyarakat yang mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya atau kemampuan yang dimiliki.

Pengembangan masyarakat pada dasarnya merupakan kegiatan yang direncanakan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam praktek pekerjaan sosial yang digunakan untuk kehidupan bersama (Hikmat, 2006:61). Harapannya petani garam memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain. Terwujudnya hal

tersebut apabila adanya peningkatan keberdayaan yang mendekatkan petani garam pada sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menentukan masa depan dan memberikan pengaruh pada kehidupan komunitasnya. Selain itu, petani garam yang telah berdaya memiliki peluang untuk meningkatkan perekonomian keluarga dan komunitasnya dan memungkinkan para petani garam untuk meningkatkan standar taraf hidup. Menurut (Laurer, 2003) taraf hidup merupakan suatu tahapan kehidupan manusia yang indikatornya dipandang dari sudut perekonomian. Gambaran sudut perekonomian yang dimaksud adalah hal-hal yang memberikan pendefinisian akan karakteristik perekonomian yang dimiliki oleh para petani garam, dimana karakteristik tersebut yang juga menjadi indikator pendefinisian taraf hidup seseorang atau suatu kelompok. Karakteristik perekonomian petani yang dapat diketahui dari penguasaan lahan, penyerapan tenaga kerja, pendapatan rumah tangga, konsumsi pangan dan non pangan, kemiskinan rumah tangga pedesaan, penerapan teknologi, dan kelembagaan (Susilowati , et al., 2010).

Struktur penguasaan lahan garam akan menentukan *accessibility* petani garam dalam surplus ekonominya (Rochwulaningsih Y. , 2007). Pernyataan tersebut dibuktikan oleh kajian yang dilakukan sebelumnya oleh Byamugisha (1999), yang menyatakan bahwa terdapat keterkaitan yang signifikan antara status sertifikasi tanah dengan peningkatan akses kredit contohnya di negara Thailand. Hasil perolehan kredit ini kemudian digunakan untuk modal usaha pertanian yang lebih produktif. Pada umumnya luasan lahan tambak garam yang dimiliki petambak garam menggambarkan kemampuan perekonomian masing-masing petambak garam. Semakin luas lahan tambak garam yang dimiliki maka semakin maju/kaya pemilik tambak garam tersebut. Penguasaan lahan merupakan tatanan dan prosedur yang mengatur hak dan kewajiban dari individu atau kelompok dalam penguasaan atas lahan (Rachmat & Hendiarto, 2000). Dalam studi sosial ekonomi pertanian tentang masalah penguasaan lahan di pedesaan Indonesia dilakukan penyederhanaan dalam pengelompokan jenis penguasaan tanah ke dalam 2 kelompok besar yaitu: (1) Milik, dan (2) Bukan milik, terdiri dari sewa, bagi hasil, gada, dan lainnya. Namun, pendekatan tersebut belum

dapat memberikan justifikasi dengan baik eksistensi dan implikasi ekonomi dari sistem kelembagaan tanah adat, melainkan cukup baik untuk menjelaskan fenomena dinamika penguasaan lahan dan hubungannya dengan pendapatan dan kesempatan kerja di pedesaan (Sumaryanto dan Rusastra, 2000 dalam Susilowati 2010). Berdasarkan hasil penelitian Patanas 1994/1995 dan 1998/1999 mengenai keterkaitan luas lahan yang dimiliki petani terhadap tingkat pendapatan petani menunjukkan struktur yang berbeda. Petani yang memiliki luasan lahan lebih sempit akan memperoleh kontribusi pendapatan lebih besar dari sektor non pertanian. Sementara itu, proporsi kontribusi pendapatan dari sektor pertanian bagi petani yang memiliki luasan lahan lebih luas akan lebih besar. Artinya terdapat korelasi positif antara luas lahan dengan tingkat pendapatan. Semakin luas lahan yang dimiliki semakin besar juga pendapatan yang diperoleh dari sektor pertanian. Pandangan tersebut tidak menutup kemungkinan dapat berlaku juga pada petani garam yang memiliki luasan tambak garam yang besar, Semakin luas tambak garam yang dimiliki maka semakin besar juga pendapatan yang diperoleh dari komoditas garam.

Luas lahan merupakan keseluruhan luas lahan yang diusahakan petani, pendapat Susilowati juga menyatakan bahwa semakin luas lahan yang diusahakan, petani akan semakin cepat mengadopsi teknologi baru karena mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih baik. Pemahaman akan teknologi yang diterapkan kepada petani garam untuk meningkatkan keberdayaan petani garam dalam meningkatkan produktivitas juga bergantung pada pendidikan atau wawasan yang diperoleh petani garam penerima program. Pendidikan merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam proses adopsi teknologi, target produksi garam akan berhasil dengan baik apabila ketersediaan dan keterampilan petani garam untuk meningkatkan produktivitas garam. Petani yang berpendidikan tinggi biasanya cenderung lebih cepat dalam mengadopsi inovasi. Sebaliknya, petani yang berpendidikan rendah akan cenderung lebih sulit melaksanakan adopsi inovasi (Soekartawi, 2005). Namun, pengalaman dan wawasan seseorang tidak harus selalu melalui pendidikan formal untuk memperoleh pengetahuan baru. Pernyataan tersebut juga dikemukakan oleh Rakhmad (2001),

bahwa pengalaman seseorang tidak selalu diperoleh dari proses belajar formal, pengalaman juga melalui rangkaian aktivitas yang pernah dialami. Tingkat pendidikan petani garam baik formal maupun non formal akan mempengaruhi cara berfikir yang diterapkan pada usahanya yaitu rasionalisasi usaha dan kemampuan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Pengalaman juga dapat membentuk sikap sebagai proses semakin meningkatnya pengetahuan yang dimiliki petani garam termasuk didalamnya dalam pengalaman penggunaan teknologi baru.

Pendefinisian lahan sebagai faktor produksi mengandung makna bahwa lahan tersebut memiliki keterkaitan dengan faktor produksi lainnya seperti tenaga kerja, modal dan keterampilan. Tenaga kerja sebagai faktor produksi mengandung arti bahwa apabila faktor tenaga kerja tidak ada, maka kegiatan produksi suatu barang tidak akan terjadi. Intensitas peranan tenaga kerja terhadap hasil produksi akan dipengaruhi oleh keterampilan kerja yang dapat dilihat dari tingkat produktivitasnya. Permasalahan tentang partisipasi tenaga kerja terhadap produktivitas adalah relatif tingginya penawaran tenaga kerja terhadap kebutuhan atau permintaan serta adanya fleksibilitas pasar tenaga kerja yang memungkinkan adanya pengangguran. Pada studi kasus tingkat pengangguran tenaga kerja sektor pertanian, terdapat beberapa kebijakan yang mengatasi permasalahan tenaga kerja dan pengangguran diantaranya adalah : (1) Pemanfaatan lahan pertanian yang potensial (2) prioritas pengembangan bagi peternakan dan perikanan yang memiliki potensi besar (3) Pengembangan sumberdaya manusia dengan sasaran peningkatan kemampuan agar mampu mengakses teknologi (4) Pengembangan kelembagaan pasar tenaga kerja yang memungkinkan partisipasi tenaga kerja dari berbagai sektor pertanian maupun non pertanian (Susilowati , et al., 2010).

Salah satu indikator kualitas tenaga kerja adalah pendidikan. Pendidikan adalah memanusiakan manusia (Drijarkara, 2001). Pendidikan merupakan usaha sadar untuk menyumbangkan kemampuan usaha manusia dalam rangka memajukan aktivitas. Pendidikan sebagai suatu aspek untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan seseorang dalam berbagai kegiatan, juga diharapkan mampu

mengembangkan potensi yang ada untuk memperoleh hasil semaksimal mungkin. Keterlibatan tenaga kerja terhadap produktivitas yang rendah ditinjau dari keterkaitan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan, disebabkan karena : (1) Terbatasnya kesempatan kerja pertanian, peternakan, maupun perikanan bagi yang berpendidikan tinggi (2) Sektor pertanian umumnya tidak mendatangkan pendapatan dalam waktu singkat (3) Usaha pertanian mengandung banyak resiko (4) pendapatan di sektor tersebut lebih rendah dari yang diharapkan (5) Kurang status sosial dan kenyamanan kerja, karena kesan pertanian yang kumuh (Dewa K.S., 2000) dalam (Kasryno, et al., 2000). Permasalahan lain yang selalu menjadi penghambat produktivitas adalah minimnya tenaga kerja berusia produktif. Dengan komposisi kelompok usia tua akan merupakan beban berat dengan produktivitas yang rendah (Rusastra, Khairina, Suryani, Suryadi, & Elizabeth, 2005). Namun hal tersebut bertentangan dengan pendapat Susilowati, et al., (2010) yang mengemukakan hubungan antara tenaga kerja usia tua dengan produktivitas usaha tani bersifat negatif, sehingga terindikasi petani yang lebih tua memiliki kapabilitas manajerial lebih tinggi sehingga dalam konteks tersebut unsur pengalaman lebih berperan. Dalam penelitian sebelumnya mengenai faktor produksi pada sektor pertanian, modal sebagai faktor produksi memiliki pengertian bahwa modal merupakan subsistem produksi usaha tani, apabila tidak ada modal maka akan mempengaruhi tingkat produktivitas. Sebab modal juga merupakan hasil produksi yang digunakan untuk kembali menghasilkan produksi selanjutnya. Produktivitas yang rendah dapat diakibatkan oleh keterbatasan dalam akses modal, sedangkan keterhambatan modal bagi petani garam dapat berdampak pada pengolahan lahan yang juga akan mempengaruhi hasil produksi garam. Model teoritis antara modal dan pertumbuhan ekonomi dibangun berdasarkan pada hipotesis bahwa modal juga berupa pengetahuan dan keterampilan yang ada dalam diri manusia disamping modal fisik dan teknologi. Hal tersebut akan meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kemampuan sebuah perekonomian untuk mengadopsi teknologi baru (de la fuente, 2011 dalam Farah & Sari, 2014).

## **2.3 Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat**

### **A. Konsep PUGAR**

Dalam rangka meningkatkan produksi garam untuk menunjang kebutuhan garam dalam negeri yang terus meningkat, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mencanangkan Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) yang sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 2011. Program ini merupakan bagian dari pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM-Mandiri KP) dan merupakan bagian dari Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam upaya mempercepat penyelesaian permasalahan kemiskinan. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor.41 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan Dan Perikanan. Dalam pedoman tersebut dijabarkan bahwa Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat yang berikut disingkat PUGAR merupakan program yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan serta penumbuhan wirausaha kelautan dan perikanan. Peningkatan kemampuan atau pemberdayaan petambak garam dilakukan untuk melaksanakan usaha pergaraman yang lebih baik, serta membantu petambak garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha pergaraman melalui perlindungan petambak garam. Usaha pergaraman merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.

Kegiatan PUGAR 2014 mengacu pada 15 Indikator Output PNPM Nasional sebagaimana Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan, dengan prioritas pada peningkatan kualitas produksi dan produktivitas di tingkat lahan tambak garam (*on farm*) melalui penguatan kapasitas petambak garam rakyat yang didukung dengan implementasi Teknologi Tepat Guna (TTG), penguatan koperasi, peningkatan partisipasi, tata kelola, pengarusutamaan gender, dan dukungan Pemerintah Daerah. Pengarusutamaan gender adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah

aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat, dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Selanjutnya usaha petambak memiliki rangkaian kegiatan dalam bidang tambak garam mulai dari sarana produksi, penanganan pasca panen, pengolahan, serta pemasaran hasil dari kegiatan pergaraman. Untuk mencapai tujuan dari program PUGAR, terdapat dua strategi utama dalam pengembangannya yaitu strategi dasar dan strategi operasional.

Strategi dasar PUGAR sebagai bagian dari PNPM Mandiri KP :

1. Peningkatan Kemampuan kelembagaan kelompok dalam mengelola BLM.
2. Optimalisasi potensi usaha kelautan dan perikanan, yaitu usaha pergaraman.
3. Fasilitasi bantuan usaha bagi masyarakat petambak garam.
4. Pendampingan Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) dalam manajemen usaha, pemanfaatan teknologi, dan kemitraan.

Kegiatan PUGAR bertujuan untuk :

1. Meningkatkan produktivitas dan kualitas garam rakyat melalui implementasi Teknologi Ulir Filter (TUF), dan/atau teknologi geomembran/isolator, serta Unit Pengolahan Garam (UPG),
2. Meningkatkan pendapatan petambak garam rakyat;
3. Memperkuat usaha KUGAR dengan memfasilitasi kemitraan/jejaring usaha dan pemasaran garam rakyat;
4. Memberdayakan perempuan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan termasuk dalam hal pengambilan keputusan;

5. Mengoptimalkan sarana dan prasarana produksi, dan pengolahan garam rakyat;
6. Menginisiasi, memberdayakan, dan meningkatkan peranan korporatisasi (Koperasi dan/atau Badan Usaha Milik Desa/BUMDes) garam rakyat di tingkat desa.

Program PUGAR menggunakan *bottom up* sebagai prinsip pelaksanaannya yang berarti petambak garam yang merencanakan, melaksanakan, memonitoring, mengevaluasi kegiatan sesuai dengan mekanisme yang ditentukan. Petambak garam adalah rakyat adalah orang yang mata pencahariannya melakukan kegiatan usaha produksi garam yang nantinya akan di koordinir dalam Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) yang pelaksanaannya akan didampingi oleh Tenaga Pendamping PUGAR. KUGAR adalah kumpulan pelaku usaha produksi garam rakyat yang terorganisir yang dilakukan dilahan tambak. Tenaga pendamping adalah orang yang mempunyai latar belakang pendidikan atau berpengalaman dibidang kelautan dan perikanan, tinggal ditengah masyarakat sasaran dan mendampingi kelompok masyarakat secara terus menerus selama berlangsungnya kegiatan PUGAR. Landasan hukum yang mendasari pelaksanaan program PUGAR mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No Per 41/ MEN/ 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan Tahun 2011. Menurut KKP tahun 2011, tujuan dari program PUGAR diantaranya :

1. Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas petambak garam rakyat yang tergabung dalam KUGAR.
2. Meningkatkan akses terhadap permodalan, pemasaran, informasi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi bagi KUGAR.
3. Meningkatkan produksi garam konsumsi untuk mendukung gerakan swasembada garam nasional.
4. Meningkatkan kualitas garam rakyat.

Dalam pelaksanaan PUGAR memiliki ruang lingkup kegiatan, dimana kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan sepanjang program PUGAR dilaksanakan demi mewujudkan tujuan dari program PUGAR. Terdapat 6 (enam) elemen pemberdayaan yang harus menjadi acuan dalam proses pemberdayaan yang dilaksanakan melalui PNPM Mandiri KP, yakni:

1. Fasilitasi/Pendampingan

Fasilitasi PNPM Mandiri KP dilakukan oleh Tenaga Pendamping mulai dari (a) mengidentifikasi/menumbuhkan kelompok, (b) memfasilitasi kelompok dalam penyusunan menyusun RUB, (c) melakukan pembinaan, pendampingan dan bimbingan teknis/manajemen usaha KP selama kegiatan usaha berlangsung, dan (d) membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

2. Partisipasi Komunitas

Dari sisi perencanaan, seluruh unsur dalam kelompok dengan difasilitasi Tenaga Pendamping berpartisipasi menyusun RUB sesuai kebutuhan yang diinginkan kelompok dalam pengembangan usaha dengan memperhatikan kelayakan usaha dan potensi desa. Dari sisi pengawasan, seluruh anggota kelompok melakukan pengawasan bersama melalui pertemuan rutin yang dilakukan untuk membahas perkembangan usaha dan pengelolaan keuangan.

3. Pengorganisasian Kelompok

KUGAR yang telah terbentuk memperoleh penguatan pengelolaan kelembagaan kelompok, manajemen keuangan dan bimbingan teknis pergarahan untuk memenuhi kebutuhan bersama.

4. Transparansi

KUGAR menyediakan papan informasi penerima PNPM Mandiri KP di kawasan sentra garam di masing-masing Kabupaten/Kota, yang sekurang-kurangnya memuat jumlah KUGAR, besarnya jumlah dana BLM, luasan lahan dan tahun perolehan BLM dan jenis kegiatannya.

Pertanggungjawaban keuangan kelompok difasilitasi oleh Tenaga Pendamping dilakukan melalui Laporan Pembelanjaan/Pemanfaatan BLM dan laporan perkembangan usaha yang secara berkala dilaporkan secara berjenjang ke Dinas Kabupaten/Kota dan Direktorat Jenderal KP3K dengan tembusan Dinas Provinsi.

5. Sistem Pengawasan

Penggunaan dana kelompok dan perkembangannya dikontrol secara bersama oleh seluruh anggota kelompok.

6. Perspektif Gender

Mulai dari proses perencanaan hingga pengambilan keputusan melibatkan peserta perempuan dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping.

Keberhasilan PUGAR sangat ditentukan oleh kerjasama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, sampai dengan dukungan anggaran dari tingkat pusat dan daerah. Indikator keberhasilan dari program PUGAR dari segi *output* diantaranya :

1. Tersalurkannya Bantuan Langsung Masyarakat kepada Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan salah satunya adalah KUGAR.
2. Terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kelembagaan KUKP yaitu KUGAR melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan.
3. Berfungsinya koperasi garam rakyat di kawasan sentra garam

Sedangkan indikator keberhasilan dari segi *outcome* yaitu :

- Meningkatkan rata-rata pendapatan petambak garam rakyat minimal sebesar 30% dari tahun sebelum mendapatkan kegiatan PUGAR;
- Terbangunnya 1 (satu) kemitraan/jejaring usaha garam rakyat di kawasan sentra garam di masing-masing Kabupaten/Kota;

- Terinisiasinya pembentukan 1 (satu) calon Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bergerak dalam bidang usaha garam di kawasan sentra garam di masing-masing Kabupaten/Kota.

## **2.4 Efektivitas**

### **A. Pengertian Efektivitas**

Efektivitas berasal dari kata efektif atau dalam bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau tepat guna. Menurut H. Emerson dalam Handayadiningrat (1995:16) menyatakan bahwa : “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.” Pernyataan ini juga selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh James L Gibson (Pasolong, 2013: 4) bahwa : “Efektivitas adalah pencapaian tujuan dari upaya bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan”. Suatu tujuan yang tercapai sesuai dengan sasaran dan targetnya menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan telah efektif.

David J. Lawles dalam Gibson (1985: 27-30) mengklasifikasi efektivitas dalam tiga tingkatan, yaitu :

#### 1. Efektivitas individu

Efektivitas individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karyawan atau anggota dari organisasi. Keberhasilan dari suatu organisasi juga bergantung dari kinerja individu yang berhubungan langsung dengan kelompok atau organisasinya

#### 2. Efektivitas kelompok

Adanya pandangan bahwa kenyataannya individu saling bekerja sama dengan anggota individu lainnya menjadi sebuah kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota dari organisasi

3. Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan efektivitas kelompok

Efektivitas organisasi pada dasarnya merupakan hasil dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui sinergitas, pekerjaan dalam organisasi mampu mendapatkan hasil yang lebih tinggi daripada jumlah efektivitas individu dan kelompok, artinya organisasi dapat memperoleh tingkat prestasi yang lebih tinggi daripada jumlah prestasi tiap individu didalamnya.

Menurut Mulyasa, efektivitas adalah bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumberdaya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional. Efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu, dan adanya partisipasi anggota. Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh beberapa sumber mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan nilai pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan oleh setiap organisasi, kegiatan, maupun program. Hal-hal tersebut dapat dinyatakan efektif apabila tujuan atau sasaran terwujud sesuai dengan harapan yang ditentukan. Hal ini juga sejalan dengan pendapat H. Emerson dalam Soewarno Handayani, dinyatakan bahwa “Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”

## **B. Konsep Efektivitas**

Penilaian efektivitas program menurut Tayibnafi (2000:23-36) dalam Ali Muhidin (2009) menjelaskan pendekatan evaluasi, yaitu :

- a. Pendekatan eksperimental (*Experimental approach*), pendekatan ini berasal dari eksperimen yang biasanya dilakukan oleh penelitian akademik dengan tujuan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum tentang dampak suatu program dengan mengontrol faktor-faktor yang mempengaruhi program.

- b. Pendekatan yang berorientasi pada tujuan (*Goal oriented approach*), pendekatan ini mengacu pada tujuan suatu program untuk menentukan tingkat keberhasilan. Dapat dianggap sebagai pendekatan yang paling praktis untuk desain pengembangan program dan memberi petunjuk bagi pelaksana program untuk menjelaskan hubungan antara kegiatan khusus yang ditawarkan dengan hasil yang akan dicapai.
- c. Pendekatan yang berfokus pada keputusan (*The decision focused approach*), pendekatan ini menekankan pada peranan informasi yang sistematis untuk pengembang program dalam melaksanakan tugasnya. Pada pandangan ini memperlihatkan bagaimana informasi sangat berpengaruh bagi pengembang program dalam membuat keputusan. Oleh sebab itu, evaluasi sangat dianjurkan agar direncanakan sesuai kebutuhan untuk keputusan program.
- d. Pendekatan berorientasi pada pemakai (*The user oriented approach*), pendekatan ini lebih memperhatikan sejumlah elemen yang cenderung mempengaruhi kegunaan evaluasi seperti faktor kondisi yang telah ada, keadaan organisasi dengan pengaruh masyarakat, situasi dimana evaluasi dilakukan dan dilaporkan dibandingkan dengan teknik analisis data.
- e. Pendekatan yang responsif (*The responsive approach*), merupakan evaluasi yang mencari pengertian suatu isu dari berbagai sudut pandang semua orang yang terlibat dan berkepentingan dengan program. Pendekatan ini menghindari respon yang diperoleh dari kuesioner atau analisis statistik sebab setiap orang yang dipengaruhi oleh program merasakan dampaknya secara unik. Evaluator lebih menjembatani pertanyaan yang berhubungan dengan program dengan menguraikan kenyataan melalui pandangan-pandangan responden.

Berhubungan dengan pendekatan-pendekatan tersebut, maka efektivitas adalah penggambaran seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna suatu program, organisasi atau kegiatan yang menyampaikan sejauh mana tujuan telah dicapai serta ukuran keberhasilan suatu program atau organisasi mencapai tujuan dan sasarannya. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Peter F Drucker dalam H.A.S Moenir (2006:166) yang mendefinisikan efektivitas pada sisi lain, menjadi kemampuan untuk memilih sasaran hasil yang sesuai. Memperhatikan pendapat ahli di atas, bahwa efektivitas merupakan suatu konsep multidimensional yang artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu walaupun hasil akhirnya adalah pencapaian tujuan.

Efektivitas kerap kali dianggap sama dengan efisien, sedangkan sesuatu yang dilakukan dengan efisien belum tentu efektif. Menurut Gibson, Ivancevich, dan Donnelly (1996:34), ukuran efektivitas program adalah sebagai berikut :

1. Produksi adalah kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan.
2. Efisiensi adalah perbandingan atau rasio antara *output* dengan *input*.
3. Kepuasan adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Keunggulan adalah tingkat dimana organisasi dapat dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal.
5. Pengembangan merupakan mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat.

Terdapat beberapa ukuran dari efektivitas yang disampaikan oleh Streers & Magdalena (1980: 46-48), yaitu:

1. Kualitas merupakan nilai layak dan tepat guna produk yang dihasilkan oleh program atau organisasi.
2. Produktivitas adalah ukuran banyaknya atau kuantitas dari jasa yang dihasilkan program oleh organisasi.
3. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinn-kemungkinan yang dapat terjadi dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik.
4. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut.
5. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang diperoleh setelah semua biaya dan kewajiban terpenuhi.
6. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan masa lampau.
7. Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi, dan sumber daya sepanjang waktu dan berkelanjutan.
8. Kecelakaan adalah frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian.
9. Semangat kerja adalah perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kerjasama mencapai tujuan, dan perasaan atau tanggung jawab memiliki.
10. Motivasi merupakan kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan.
11. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain atau keeratan antar individu dalam kelompok dalam bekerjasama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan.

12. Keluwesan adaptasi artinya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasi yang bertujuan untuk mencegah keterbukaan terhadap rangsangan atau pengaruh lingkungan.

Berdasarkan ukuran dari efektivitas diatas, bahwa apabila suatu program yang dilaksanakan oleh organisasi tertentu akan memiliki pencapaian sesuai dengan tujuan apabila pelaksanaannya memiliki unsur yang menjadi ukuran sebuah implementasi program dikatakan efektif seperti kualitas dan kuantitas produk atau jasa yang tepat dan sesuai tujuan, stabilitas dari keberhasilan program terus terjaga, motivasi dan semangat kerja dari tiap individu dari suatu organisasi yang menerapkan program diikuti oleh kepaduan dan keluwesan pelaku program dalam menjalankan tanggung jawab meskipun ada faktor penghambat dari lingkungan sekitar.

## **2.5 Dampak**

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. (KBBI Online, 2010). Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif.

Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil. Dari penjabaran diatas maka kita dapat membagi dampak ke dalam dua pengertian yaitu;

### **1. Pengertian Dampak Positif**

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik. positif adalah suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang menjemukan, kegembiraan dari pada kesedihan, optimisme dari pada pesimisme. 7 Positif adalah keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usaha-usaha yang sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya supaya tidak membelokkan fokus mental seseorang pada yang negatif. Bagi orang yang berpikiran positif mengetahui bahwa dirinya sudah berpikir buruk maka ia akan segera memulihkan dirinya. Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.

### **2. Pengertian Dampak Negatif**

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. berdasarkan beberapa penelitian ilmiah disimpulkan bahwa negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya. Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak negatif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

## 2.6 Sintesa Literatur

**Tabel II. 1 Sintesa Literatur**

| No. | Aspek                 | Deskripsi   | Penulis                            | Tahun | Sitasi Penelitian  |
|-----|-----------------------|---|------------------------------------|-------|--|
| 1.  | Kawasan Ekonomi Garam | Kawasan Ekonomi Garam merupakan bagian dari industrialisasi kelautan dan perikanan melalui peningkatan nilai tambah dan daya saing produk kelautan dan perikanan salah satunya adalah garam   | Kementerian Kelautan dan Perikanan | 2012  | Permen Kelautan dan Perikanan No. 27 Tahun 2012                                |
|     |                       | Hal-hal yang berkaitan dengan konsep KEG diantaranya : (1) Strategi penataan dan pengembangan kawasan dan sentra produksi secara berkelanjutan salah satunya melalui penyiapan kawasan garam, (2) Strategi pengembangan konektivitas dan infrastruktur serta perluasan hubungan bisnis hulu-hilir, (3) Strategi pengembangan usaha dan investasi melalui penguatan pemasaran garam, (4) Pengembangan teknologi produktif budidaya dan penangkapan ikan serta pengolahan hasil perikanan dan garam |                                    |       |  |
|     |                       | Konsep Kawasan Ekonomi Garam diantaranya : (1) Membangun kawasan garam mulai dari hulu-hilir (pemberdayaan-pengolahan-pemasaran), (2) Mengoptimalkan infrastruktur pergaraman (pembangunan Gudang Garam Nasional), (3) Mengoptimalkan besaran produksi garam untuk memenuhi kebutuhan pangan dan non pangan (melalui inovasi integrasi lahan), (4) Menjadikan proses tata niaga komoditas garam menjadi lebih efisien (pelibatan stakeholder), (5) Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.      |                                    | 2019  | Hasil notulensi Rapat KE Garam bersama Subdit Jasa Kelautan dan Biofarmakologi |
|     |                       | Komoditas garam masih menghadapi permasalahan karena persaingan pasar dan kualitas kebutuhan konsumen yang sangat tinggi, hal tersebut berpengaruh pada upaya peningkatan pendapatan petani garam terhadap pembangunan ekonomi secara keseluruhan   | Kementerian Kelautan dan Perikanan | 2012  | Pedoman Umum Industrialisasi Kelautan dan Perikanan                            |

| No | Aspek                                 | Deskripsi   | Penulis                             | Tahun | Sitasi Penelitian                                     |
|----|---------------------------------------|---|-------------------------------------|-------|---|
| 2. | Problematika Produksi Garam Indonesia | Produksi garam nasional pada saat ini hanya mampu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri dari segi konsumsi saja, sementara untuk industri dipenuhi dari impor   | Effendy, Heryanto, Sidik, & Muhsoni | 2016  | Perencanaan Usaha Korporitas Usaha Garam Rakyat       |
|    |                                       | Produksi garam nasional pada tahun 2010 sempat mengalami penurunan tajam hingga hanya mencapai 30,6 ribu ton. Turun sangat signifikan dari produksi tahun sebelumnya yang mencapai 1,4 juta ton. Merosotnya produksi garam pada tahun 2010 disebabkan adanya perubahan iklim dimana musim hujan yang terjadi hampir sepanjang tahun sehingga merusak siklus produksi garam  | Eka Utami Aprilia                   | 2011  | Tempo.co  |
|    |                                       | Produksi garam rayat masih membutuhkan proses pengolahan lebih lanjut untuk dapat memenuhi segala standar yang dibutuhkan hingga layak konsumsi oleh masyarakat   | Effendy, Zainuri, & Hafiluddin      | 2014  | Intensifikasi Lahan Tambak Garam di Kabupaten Sumenep |
|    |                                       | Rendahnya kualitas produksi garam serta persaingan dengan garam impor membuat harga garam dalam negeri semakin tidak stabil. Penyebab permasalahan kualitas garam rakyat juga ada pada tingkat petani garam, dimana petani garam rakyat masih minim akses terhadap teknologi, permodalan, serta transportasi. Padahal, usaha produksi garam rakyat juga merupakan salah satu roda penggerak perekonomian, sebab menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat di kawasan pesisir Indonesia dan menjadi sarana untuk mengentaskan kemiskinan. | Kusumastanto & Satria               | 2011  | Strategi Pembangunan Desa Pesisir Mandiri             |

| No | Aspek                            | Deskripsi   | Penulis    | Tahun | Sitasi Penelitian  |
|----|----------------------------------|---|------------|-------|--|
| 3. | Tingkat Keberdayaan Petani Garam | Diperlukan sebuah upaya pemberdayaan masyarakat sebagai konsep pembangunan untuk menanggulangi ketidakberdayaan petani garam. Sebab, pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan yang merangkum multi-aspek. Konsep ini mewakili paradigma baru pembangunan yang bersifat <i>people centred</i> , <i>participatory</i> , <i>empowering</i> , dan <i>sustainable</i> . | Firmansyah | 2012  | Ketercapaian Indikator Keberdayaan Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) di Kota Banjarmasin |

| No | Aspek | Deskripsi  | Penulis         | Tahun | Sitasi Penelitian  |
|----|-------|--|-----------------|-------|--|
|    |       | Dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat harus dilihat dari tiga sisi yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang, memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat, dan meningkatkan keberdayaan harus mengandung arti melindungi.  | Sumodiningrat   | 1998  | Membangun Perekonomian Rakyat  |
|    |       | Prinsip-prinsip pemberdayaan diantaranya prinsip holisme, keberlanjutan, keanekaragaman, perkembangan organik, perkembangan yang seimbang, dan mengatasi struktur yang merugikan   | Ife & Tesoriero | 2014  | Community Development, Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi |
|    |       | Indikator derajat keberdayaan diantaranya : (1) Tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah (power to), (2) Tingkat kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses (power within), (3) Tingkat kemampuan menghadapi hambatan (power over), (4) Tingkat kemampuan partisipasi atau kerjasama dan solidaritas (power with). | Suharto         | 2006  | Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial                        |
|    |       | Indikator keberdayaan lainnya yang berkaitan dengan basis keberdayaan, yakni : (1) Pengembangan berbasis masyarakat, (2) Keberlanjutan, (3) Partisipasi masyarakat.  | Friedman        | 1992  | The Politics of Alternative Development                                      |

| No | Aspek | Deskripsi   | Penulis             | Tahun | Sitasi Penelitian   |
|----|-------|---|---------------------|-------|---|
|    |       | Keberhasilan pelaksanaan program peningkatan keberdayaan masyarakat ditentukan oleh mekanisme pelaksanaan program dimana mekanisme tersebut sangat menentukan keberhasilan dan keberlanjutan dari program pengembangan masyarakat yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif. Untuk itu adanya pilihan teknologi dan tingkat layanan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat menjadi prasyarat utama dalam keberlanjutan | Vlacheas, P. et.al  | 2013  | Enabling smart cities through a cognitive management framework for the internet of things |
|    |       | Dampak dari pemberdayaan masyarakat adalah kemandirian masyarakat dalam mengatasi permasalahan melalui prakarsa dan kreatifitas untuk meningkatkan kualitas hidup. Sehingga dapat dinyatakan bahwa tujuan dari pemberdayaan adalah terbentuknya individu atau masyarakat yang mandiri.  | Sulistiyani         | 2004  | Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan  |
|    |       | Penguasaan lahan merupakan tatanan dan prosedur yang mengatur hak dan kewajiban dari individu atau kelompok dalam penguasaan atas lahan.  | Rachmat & Hendiarto | 2000  | Dinamika Kelembagaan Lahan dan Hubungan Kerja Pertanian dalam Prosiding                   |
|    |       | Struktur penguasaan lahan garam akan menentukan accesbility petani garam dalam surplus ekonominya   | Rochwulaning sih Y  | 2007  | Analisis Kasus Petani Garam di Rembang Jawa Tengah  |

| No | Aspek                                   | Deskripsi  | Penulis                             | Tahun | Sitasi Penelitian   |
|----|---|--|-------------------------------------|-------|---|
| 4. | Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat | PUGAR merupakan program yang ditujukan untuk meningkatkan penguatan kapasitas atau kemampuan dan pendapatan serta penumbuhan wirausaha kelautan dan perikanan.   | Permen Kelautan dan Perikanan No.41 | 2011  | Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan Dan Perikanan |
|    |   | Usaha pergaraman merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran. Selanjutnya usaha petambak memiliki rangkaian kegiatan dalam bidang tambak garam mulai dari sarana produksi, penanganan pasca panen, pengolahan, serta pemasaran hasil dari kegiatan pergaraman   |                                     |       |   |
|    |   | <p>Strategi dasar PUGAR sebagai bagian dari PNPM Mandiri KP:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kemampuan kelembagaan kelompok dalam mengelola BLM.</li> <li>2. Optimalisasi potensi usaha kelautan dan perikanan, yaitu usaha pergaraman.</li> <li>3. Fasilitasi bantuan usaha bagi masyarakat petambak garam.</li> <li>4. Pendampingan Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) dalam manajemen usaha, pemanfaatan teknologi, dan kemitraan.</li> </ol> <p>Indikator keberhasilan dari program PUGAR dari segi output diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersalurkannya Bantuan Langsung Masyarakat kepada Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan salah satunya adalah KUGAR.</li> <li>2. Terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kelembagaan KUKP yaitu KUGAR melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan.</li> </ol> <p>Indikator keberhasilan dari segi outcome yaitu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan rata-rata pendapatan petambak garam rakyat minimal sebesar 30% dari tahun sebelum mendapatkan kegiatan PUGAR;</li> <li>• Terbangunnya 1 (satu) kemitraan/jejaring usaha garam rakyat di kawasan sentra garam di masing-masing Kabupaten/Kota;</li> <li>• Terinisiasinya pembentukan 1 (satu) calon Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bergerak dalam bidang usaha garam di kawasan sentra garam di masing-masing Kabupaten/Kota.</li> </ul> |                                     |       |   |

| No | Aspek       | Deskripsi   | Penulis                          | Tahun | Sitasi Penelitian                               |
|----|-------------|---|----------------------------------|-------|---|
| 5. | Efektivitas | Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya  | H. Emerson                       | 1995  | Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen |
|    |             | Efektivitas diklasifikasikan dalam tiga tingkatan, yaitu : (1) Efektivitas individu, (2) Efektivitas kelompok, (3) Efektivitas organisasi.  | David J. Lawles                  | 1985  | Organisasi (terjemahan Agus Dharma)             |
|    |             | Ukuran efektivitas program diantaranya adalah produksi, efisiensi, kepuasan, keunggulan, dan pengembangan.  | Gibson, Ivancevich, dan Donnelly | 1996  | Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses          |
|    |             | Terdapat ukuran efektivitas, diantaranya : kualitas, produktivitas, kesiagaan, efisiensi, penghasilan, pertumbuhan. Stabilitas, kecelakaan, semangat kerja, motivasi, kepaduan, dan keluwesan | Streers & Magdalena              | 1980  | Efektivitas Organisasi                          |

| No | Aspek           | Deskripsi  | Penulis                    | Tahun | Sitasi Penelitian   |
|----|-----------------|--|----------------------------|-------|---|
| 6. | Teknik Evaluasi | Tanpa evaluasi sangat sulit untuk menunjukkan pengembangan sebagai alasan perbaikan sistem pada suatu program pemberdayaan   | Rogers & Wright            | 1998  | Measuring Organizational Performance in Strategic Human Resource Management |
|    |                 | Evaluasi program merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi untuk dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan, menyusun kebijakan, maupun menyusun program selanjutnya.   | Poell, Rocco, & Roth       | 2014  | The Routledge Companion to Human Resource Development                       |
|    |                 | Tujuan evaluasi adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dan objektif tentang suatu program. Informasi tersebut dapat berupa proses pelaksanaan program, dampak atau hasil yang dicapai, efisiensi serta pemanfaatan hasil evaluasi yang difokuskan untuk program itu sendiri, yaitu unruk mengambil keputusan apakah program tersebut layak dilanjutkan, diperbaiki atau dihentikan  |                            |       |   |
|    |                 | Evaluasi dapat membantu untuk : menentukan apakah program SDM mencapai tujuannya; mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan; menentukan rasio biaya-manfaat program; putuskan siapa yang harus berpartisipasi dalam program dimasa mendatang; mengidentifikasi peserta mana yang paling diuntungkan atau setidaknya diuntungkan dari program; memperkuat poin utama yang harus dilakukan untuk para peserta; mengumpulkan data untuk membantu dalam pemasaran program masa depan; menentukan apakah program tersebut sesuai; membangun data base untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan. | Phillips                   | 1996  | Training and Development  |
|    |                 | Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) merupakan sebuah pendekatan evaluasi yang berorientasi pada pengambil keputusan untuk memberikan bantuan kepada leader pengambil keputusan.   | Stufflebeam dan Shinkfield | 1985  | Systematic Evaluation: A Self-Instructional Guide to Theory and Practice    |

Sumber : Peneliti, 2020

## 2.7 Sintesa Variabel

Tabel II. 2 Sintesa Variabel

| No. | Sasaran   | Variabel   | Sub-variabel   | Justifikasi   | Sumber   |
|-----|---|--|--|---|--|
| 1.  | Mengidentifikasi karakteristik sosial-ekonomi petani garam yang menerima Program PUGAR di Kecamatan Pangarengan | Karakteristik Sosial-Ekonomi Petani Garam Rakyat | Struktur penguasaan lahan  | Terkait aksesibilitas petani garam dalam surplus ekonominya.  | Rochwulaningsih. Y (2007)  |
|     |   |  |  | Penguasaan lahan merupakan tatanan dan prosedur yang mengatur hak dan kewajiban dari individu atau kelompok dalam penguasaan atas lahan | Rachmat & Hendiarto (2000)   |
|     |   |  | Usia   | Faktor usia berpengaruh pada tingkat produktivitas.   | Rusastra, Khairina, Suryani, Suryadi, & Elizabeth (2005)                                 |
|     |   |  |  | Komposisi usia berpengaruh pada produktivitas dan pengalaman bekerja seseorang  | Susilowati , et al., (2010)  |
|     |   |  | Pendidikan   | Pendidikan merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam proses adopsi teknologi.   | Soekartawi, 2005   |
|     |   |  | Pendapatan petani garam  | Sebagai indikator keberhasilan program dari segi outcome yaitu meningkatnya pendapatan.   | Pedoman Pelaksanaan Program Pmberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan (2011) |
|     |   |  | Modal  | Sebagai faktor produksi yang berpengaruh pada tingkat produktivitas   | Susilowati , et al., (2010)  |
|     |   |  | Teknologi pengolahan garam   | Teknologi pengolahan garam yang digunakan masyarakat berpengaruh pada kualitas garam yang dihasilkan                                    | Kusumastanto & Satria (2011)   |
|     | Pengalaman kerja dibidang usaha garam   |  | Pengalaman dapat membentuk sikap sebagai proses semakin meningkatnya pengetahuan yang dimiliki petani garam termasuk didalamnya dalam pengalaman penggunaan teknologi baru | Rakhmad (2001)  |  |

| No. | Sasaran  | Variabel                     | Sub-variabel   | Justifikasi   | Sumber  |
|-----|--|------------------------------|--|---|---|
| 2.  | Mengidentifikasi ketercapaian dampak program PUGAR | (a). Indikator Outcome PUGAR | Peningkatan pendapatan petani garam rakyat               | Keberhasilan program diukur dari peningkatan rata-rata pendapatan petani garam rakyat sebesar 30% dari tahun sebelum mendapat program PUGAR (pada tahun 2010) | Pedoman Teknis Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) Tahun 2014 |
|     |  |                              | Jumlah kemitraan/jejaring usaha garam rakyat             | Terbangunnya minimal 1 kemitraan usaha garam rakyat di kawasan sentra garam   |   |
|     |  |                              | Jumlah BUMDes yang bergerak di bidang usaha garam rakyat | Terinisiasi minimal 1 BUMDes yang bergerak dibidang usaha garam di kawasan sentra garam   |   |
|     |  | (b). Elemen Pemberdayaan     | Fasilitasi/Pendampingan                                  | Terdapat fasilitasi oleh tenaga pendamping PUGAR dalam bentuk pembinaan, pendampingan, dan bimbingan teknis/manajemen usaha penggaraman                       | Pedoman Teknis Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) Tahun 2014 |
|     |  |                              | Partisipasi Komunitas                                    | Terdapat pertemuan rutin yang dilakukan untuk membahas perkembangan usaha garam rakyat, pengelolaan keuangan, dan penyusunan RUB                              |   |
|     |  |                              | Pengorganisasian Kelompok                                | Dilakukan penguatan pada kelompok-kelompok usaha garam rakyat, manajemen keuangan, dan bimbingan teknis usaha garam untuk memenuhi kebutuhan bersama          |   |
|     |  |                              | Transparansi   | Anggota PUGAR menyediakan papan informasi yang memuat jumlah KUGAR, luasan lahan, besarnya jumlah BLM, tahun perolehan BLM, dan jenis kegiatannya             |   |
|     |  |                              | Sistem Pengawasan  | Penggunaan dana kelompok dan perkembangannya dikontrol secara bersama oleh seluruh anggota kelompok   |   |
|     |  |                              | Perspektif Gender  | Mulai dari proses perencanaan hingga pengambilan keputusan melibatkan peserta perempuan dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping                            |   |

| No. | Sasaran  | Variabel            | Sub-variabel  | Justifikasi  | Sumber                 |
|-----|--|---------------------|---|--|------------------------|
| 3   | Menganalisis tingkat keberdayaan dari petani garam yang menerima program PUGAR | Tingkat Keberdayaan | Tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah                   | Apabila muncul kesadaran dan keinginan untuk berubah pada petani garam anggota PUGAR, maka individu tersebut berada pada level 1 tingkat berdaya.                                      | Ife & Tedoriero (2014) |
|     |  |                     | Tingkat kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses | Apabila petani garam anggota PUGAR memiliki kemampuan untuk memperoleh akses dalam rangka meningkatkan kapasitas, maka individu tersebut berada pada level 2 tingkat berdaya           |                        |
|     |  |                     | Tingkat kemampuan menghadapi hambatan                           | Apabila petani garam anggota PUGAR memiliki kemampuan untuk menghadapi hambatan yang berkaitan dengan kegiatan usaha garam, maka individu tersebut berada pada level 3 tingkat berdaya |                        |
|     |  |                     | Tingkat kemampuan kerjasama dan solidaritas                     | Apabila petani garam anggota PUGAR memiliki kemampuan untuk bekerjasama dan membentuk relasi terkait usaha garam, maka individu tersebut berada pada level 4 tingkat berdaya           |                        |

Sumber : Peneliti, 2020